

**PERISTIWA PEMBAKARAN BENDERA EKS HIZBUT
TAHRIR INDONESIA (HTI) OLEH BARISAN ANSOR
SERBAGUNA NAHDLATUL ULAMA (BANSER) DALAM
PERSPEKIF IDEOLOGI LOUIS ALTHUSSER**

SKRIPSI

Disusun Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

Muhammad Fikri Aziz

NIM: E71213110

**PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL SURABAYA**

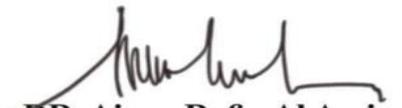
2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Muhammad Fikri Aziz** ini telah diperiksa dan disetujui untuk
diujikan.

Surabaya, 13 Maret 2020.

Pembimbing I



DR. Ainur Rofiq Al Amin
NIP. 197206252005011007

Pembimbing II



Muchammad Helmi Umam, S.Ag, M.Hum
197905042009011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Oleh **Muhammad Fikri Aziz** ini telah dipertahankan di depan tim

Penguji Skripsi

Surabaya, 13 Maret 2020

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,



Dr. Kunawi Basvir M.Ag
NIP. 196409181992031002

Penguji I

DR. Ainur Rofiq Al Amin
NIP. 197206252005011007

Penguji II

Muchammad Helmi Umam, S.Ag, M.Hum
197905042009011010

Penguji III

Dr. Muktafi. M.Ag
196008131994031003

Penguji IV

Drs. Tasmuji, M.Ag
196209271992031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Fikri Aziz
NIM : E71213110
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Maret 2020
Saya yang menyatakan



Muhammad Fikri Aziz
E71213110





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Filcri A2i2
NIM : E71213110
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : Muhammadelaziz5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Peristiwa Pembakaran Bendera Eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
oleh Barisan Anshor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) dalam
prespektif Ideologi Louis Althusser

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Maret 2020

Penulis

(M-Filcri - A2i2)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul : “Peristiwa Pembakaran Bendera eks Hizbut Tahrir Indonesia Oleh Barisan Anshor Serbaguna Nahdlatul Ulama Dalam Perspektif Ideologi Louis Althusser”

Nama Mahasiswa : Muhammad Fikri Aziz

NIM : E71213110

Pembimbing : 1. Dr. ainur Rofiq Al Amin
2. Muchammad Helmi Umam, M. Hum

Skripsi ini adalah studi tentang munculnya dinamika peristiwa pembakaran bendera eks HTI oleh Banser di Garut Jawa Barat saat Merayakan Hari Santri Nasional. peristiwa tersebut dipicu oleh identitas bendera yang menjadikan polemik, sehingga memunculkan beberapa frame terkait peristiwa tersebut. Kelompok bela negara menyebutkan bahwa bendera tersebut merupakan milik kelompok eks HTI yang keberadaannya telah dilarang, sedangkan aksi bela agama mengklaim bahwa bendera tersebut milik umat Islam dan tindakan pembakaran itu diklaim sebagai bentuk penistaan agama. Kedua statement itu dibentuk melalui frame ideologi masing-masing kelompok yang akan dikaji dengan ideologi Althusser. Penelitian ini bertujuan untuk mejabarkan kembali framing peristiwa pembakaran bendera yang terjadi di Garut dan menganalisisnya dalam Perspektif ideologi Louis Althusser. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yakni: kajian pustaka (*Library Research*) baik berupa buku, jurnal, dan lain sebagainya. Hasil daripada penelitian ini ditemukan beberapa praktik ideologi keagamaan yang menyertai dinamika peristiwa tersebut. Hal ini terjadi karena banyaknya ormas agama yang menaunginya, sehingga melahirkan frame yang membentuk gerakan yang memobilisasi aksi.

Dalam tinjauan Althusser agama menjalankan praktik ideologinya melalui ISA yang direpresentasikan dalam sebuah visi dan misi oleh masing-masing kelompok, sedangkan ideologi RSA merepresentasikan tindakan akan hasil dari ISA. Banser sendiri memandang bendera tersebut milik eks HTI karena secara fungsional bendera tersebut dipakai dan digunakan beberapa kelompok radikal dalam visi misi negara Khilafah, dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh banser merupakan representasi dari visi dan misi yang diperolehnya yang mengusung ide nasionalisme landasannya, Hubbul wathon Jargonnya dan Islam Ahluss Sunnah Alirannya.

Kata Kunci: Bendera eks HTI, Banser, Ideologi Louis Althusser.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	ii
PENGESAHAN SKRIPSI -----	iii
PERNYATAAN KEASLIAN -----	iv
MOTTO -----	v
PERSEMBAHAN -----	vi
ABSTRAK -----	viii
KATA PENGANTAR -----	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI -----	xi
DAFTAR ISI -----	xii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah-----	14
C. Tujuan Penelitian-----	15
D. Kegunaan Penelitian -----	15
E. Definisi Operasional-----	17
F. Tinjauan Pustaka -----	19

G. Metode Penelitian -----	23
1. Jenis Penelitian -----	23
2. Sumber Data -----	23
3. Tahap pengolahan Data -----	24
H. Sistematika Pembahasan -----	25
BAB II KAJIAN TEORI -----	27
A. Latar Belakang Louis Althusser -----	27
B. Karya-Karya Pemikirannya -----	31
C. Pemikiran Ideologi Louis Althusser -----	32
1. ISA (<i>Ideological State Apparatus</i>) -----	38
2. RSA (<i>Repressive State Apparatus</i>) -----	44
BAB III DINAMIKA PERISTIWA PEMBAKARAN BENDERA EKS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) OLEH BARISAN ANSOR SERBAGUNA NAHDLATUL ULAMA (BANSER) -----	49
A. Awal Mula Munculnya Peristiwa Pembakaran Bendera eks HTI -----	49
B. Motif dan Tujuan Pembakaran Bendera eks HTI -----	56
C. Indikasi Munculnya Peristiwa Pembakaran Bendera eks HTI	60

BAB IV	ANALISIS FRAMING PERISTIWA PEMBAKARAN BENDERA	
	EKS HTI OLEH BANSER DALAM PERSPEKTIF IDEOLOGI LOUIS	
	ALTHUSSER -----	64
	A. Dari Bela Negara Sampai Bela Agama-----	64
	1. <i>Diagnostic Framing</i> -----	66
	2. <i>Prognostic Framing</i> -----	69
	3. <i>Motivational Framing</i> -----	72
	B. Tinjauan ISA (<i>Ideological State Apparatus</i>) -----	74
	C. Tinjauan RSA (<i>Repressive State Apparatus</i>) -----	81
BAB V	PENUTUP -----	85
	A. Kesimpulan -----	85
	B. Saran-----	87
	DAFTAR PUSTAKA -----	88

memiliki tujuan dan salah satunya yakni mengubah kesadaran masyarakat terhadap pandangan politik. Menurut pandangan HTI sendiri politik merupakan sistem untuk mengatur dan memelihara masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam. Dalam keyakinan HTI, hukum Islam tidak akan terbentuk jika tidak didasari dengan konsep khilafah (negara Islam) yang mengharuskan anggotanya untuk berpedoman teguh terhadap al Qur'an dan as-Sunnah yang telah dibawa nabi Muhammad SAW, seperti halnya konsep khilafah pada masa kenabian. Organisasi HTI menegaskan bahwasannya pemikiran dan aktifitas yang disampaikan oleh HTI merupakan suatu gerakan yang diambil semata-mata ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, hal itu juga disebabkan oleh dasar pemikiran HTI sebagai gerakan politik yang berideologi Islam. Mereka menjelaskan beberapa aspek tentang ke-Islaman seperti halnya; Aqidah Islam, hukum Islam, pendapat, pemikiran serta konsep yang disebarluaskan lewat buku, media, pamflet dan seminar yang telah digelar di beberapa tempat. Banyak juga ide-ide HTI yang bermunculan di lapisan masyarakat baik yang tersebar di Masjid, perkantoran, pabrik, kampus baik lewat diskusi maupun seminar dan juga terdapat di buletin al Wa'ie sebagai lembaga dakwah HTI. Sehingga HTI menyebar dengan pesat di 150 kota di seluruh Indonesia.

Dalam konteks kenegaraan Indonesia, keberadaan HTI jauh berbeda dengan keberadaan ormas di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya, baik secara konsep maupun dalam dinamika lokal yang ada di Indonesia seperti halnya munculnya "transnasionalisasi", para ormas Islam di

yang tercipta oleh suatu penguasa guna untuk menciptakan kekuatan dalam kekuasaan.

Bagi Althusser, ideologi yang tertanam pada masyarakat merupakan suatu konsepsi yang telah dibentuk atau diciptakan oleh kekuatan atau kekuasaan dalam hal ini Althusser menyebutkan Pemerintahan negara, Baik itu ISA maupun RSA. ISA sendiri memiliki bersifat halus sehingga masyarakat dengan sukarela menerima ideologi yang dibawa oleh pemerintahan seperti halnya Pancasila, UUD 45, agama, pendidikan dan lain sebagainya, sedangkan RSA merupakan ideologi yang merepresentasikan ideologi itu sendiri, ideologi ini merupakan kekuatan pemerintahan yang langsung menekan sehingga masyarakat akan tunduk terhadap pemerintahan seperti halnya, Penjara, Polisi, Hakim dan lain sebagainya.

Maka dalam teori tersebut penulis menyatakan bahwa ideologi yang dianut masyarakat tidak lepas dari ideologi yang dibawa oleh pemerintahan negara. Dengan demikian penulis ingin menjabarkan tindakan yang dilakukan oleh Banser terhadap bendera eks HTI lewat ideologi Louis Althusser. Pada umumnya pihak Banser melakukan pembakaran bendera HTI, dengan alasan bahwa HTI telah dibubarkan oleh pemerintahan Indonesia, sehingga simbol yang menjadi identitas atau aktifitas HTI harus juga dilegalkan, dengan alasan untuk menangkal kelompok radikal serta menjaga kedaulatan negara dengan berlandaskan ideologi pancasila.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat maupun para intelektual untuk menambah wacana keilmuannya, sehingga masyarakat dapat memahami serta mengerti akan praktik dari teori ideologi Louis Althusser. Selain itu, dalam penelitian ini juga mengkaji tentang dinamika sosial pada saat terjadinya peristiwa pembakaran bendera eks hti yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2018 bertepatan dengan acara hari santri yang sempat viral di media massa sehingga penelitian ini berguna untuk mencapai pemahaman masyarakat secara rasional dan kritis terkait dinamika peristiwa sosial.

2. Aspek Praktis:

Manfaat adanya penelitian ini juga diharapkan untuk dapat memotifasi seseorang dalam memahami dinamika peristiwa pembakaran bendera tauhid dengan prespektif Louis Althusser. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti lainnya untuk dijadikan sebagai literatur atau referensi atas penelitiannya dalam sebuah karya ilmiah yang nantinya akan dipublikasikannya seperti buku, tesis, dan skripsi. Terahir, dalam penelitian ini nantinya akan ditulis dalam bentuk skripsi, sebagaisebuah syarat akademis mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (S1).

E. Definisi Operasional

Dalam memperjelas judul peneliti perlu menegaskan sebuah istilah yang bersangkutan dengan judul penelitian tersebut yaitu **“Peristiwa**

karena itu, pada sistematika pembahasan karya ilmiah ini tersusun sebagai berikut.

Bab *Pertama*, Dalam pertama ini berisi pendahuluan, peneliti memberikan gambaran tentang latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, Dalam bab kedua ini, membahas tentang kajian teori yang meliputi: biografi Louis Althusser, karya Louis althusser, serta pemikiran Ideologi Louis Althusser.

Bab *Ketiga*, Dalam bab ini membahas tentang penyajian data, yang akan menjabarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dinamika pembakaran bendera eks HTI yang meliputi: awal mula munculnya peristiwa pembakaran bendera eks HTI, motif dan tujuan pembakaran bendera eks HTI, serta indikasi munculnya peristiwa pembakaran eks HTI.

Bab *keempat*, Dalam bab ini, berisikan analisis data peristiwa pembakaran bendera eks HTI dalam perspektif Louis Althusser yang meliputi: Tinjauan *Ideological State Apparatus* (ISA) dan Tinjauan *Repressive State Apparatus* (RSA).

Bab *kelima*, Dalam bab ini berisikan tentang uraian kesimpulan dari pokok pembahasan, yang terangkai dengan susunan kritik dan saran bagi pembaca.

melanggengkan spesiesnya lalu dipolakan dalam kebudayaan dan peradaban, menjelma struktur yang kemudian membentuk individu-individu baru sebagai subjek penerus spesies manusia.

2. Pendekatan kedua ini, sepenuhnya bersandar pada ide gagasan materialisme Marx. Sebab pada dasarnya Althusser sendiri merupakan seorang Marxis. Dalam hal ini, Althusser memandang bahwa kehadiran manusia didunia ini tidak bisa lepas dari manusia lain untuk bertahan hidup. Kebutuhan bagi individu bagi individu lain merupakan syarat mutlak yang tidak bias dipungkiri oleh manusia. Sebab keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Lahirlah upaya setiap individu untuk bersatu dalam kelompok demi menjaga eksistensinya dalam usaha pemenuhan kebutuhan. Wujud konkret dalam semuanya adalah adanya sistem produksi. Usaha itu terus dilakukan dan setiap usaha yang dianggap baik bagi produksi akan dipertahankan, dibakukan, dan diwariskan kepada generasi penerus (direproduksi). Selain reproduksi itu menciptakan sumber daya manusia dalam wujud tenaga kerjayang terampil guna menghasilkan sumber daya pemenuh kebutuhan, juga ada reproduksi kesiapsediaan dan kepatuhan. Reproduksi inilah yang sejalan dengan ide Antonio Gramsci tentang hegemoni ideologi. Althusser mengatakan bahwa segala bentuk institusi semacam sekolah, tentara, bahkan institusi keagamaan berperan melanggengkan kebutuhan reproduksi kepatuhan terhadap kekuasaan. Dalam penjabarannya Althusser menyatakan, semua agen produksi, eksploitasi dan represi, termasuk para „profesional dari ideologi“, dengan

manusia untuk bergerak maju. Disisi lain ideologi juga ancaman, yang menjadikan ilusi yang membutakan manusia dengan berujung pada kekecewaan. Sehingga pada tataran ini, Althusser berpendapat bahwa “tidak ada sesuatu apapun yang berada di luar jangkauan ideologi (bagi dirinya sendiri), atau pada saat yang sama, tidak ada sesuatu apapun yang tidak berada di luar ideologi (bagi ilmu dan realitas)”.

Melalui pendekatan secara struktur oleh Althusser dibagi lagi menjadi dua bagian yakni ideologi sebagai *Ideological State Apparatus* (ISA) dan ideologi *Repressive State Apparatus* (RSA). Sementara fungsi tersebut direpresentasikan oleh Althusser sebagai implementasi dari suatu struktur ISA dan RSA. Berdasarkan fungsinya, ISA merupakan suatu bentuk ideologi itu sendiri yang dapat dirasakan secara halus, ideologi ini terstruktur secara obyektif yang melaksanakan fungsinya melalui internalisasi tanpa kekerasan, sedangkan ideologi yang kedua yakni RSA merupakan mesin untuk merepresentasikan ideologinya, yang dimaksudkan oleh Althusser bahwa RSA ialah segala bentuk struktur obyektif negara yang melaksanakan fungsinya untuk melanggengkan negara melalui kekerasan dengan bertindak secara tegas dalam penyampaiannya.

Dengan demikian, kedua ideologi tersebut dapat dibedakan melalui cara kerjanya dalam menentukan status quonya yakni: *apparatus ideologis* bekerja dengan “melalui ideologi” sedangkan *apparatus represif* berjalan

pengetahuan merupakan pokok yang paling mendasar bagi setiap individu. Dalam memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan ini, semua bentuk institusi yang bergerak dalam bentuk pendidikan atau edukasi menanamkan suatu praktik ideologi melalui buku pembelajaran dan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Ideologi ini berbentuk variatif sebab berbagai institusi pendidikan dalam menempuh cita-citanya sangat berbeda-beda. Sebagai contoh ketika seorang guru memberi tugas rumah kepada siswanya dengan tujuan supaya siswa tetap belajar dengan tekun ketika di rumah. Pekerjaan rumah (PR) sebagai media penerapan ideologi dalam implementasinya terhadap ISA Pendidikan.

Ketiga keluarga, ideology ini berawal dan berada dalam lingkungan keluarga. Ideologi ini muncul sebagai pengenalan individu terhadap lingkungannya. Dalam lingkungan keluarga, seorang individu seringkali diberi arahan oleh kepala keluarga, kepala keluarga sendiri diwajibkan untuk memberikan arahan serta keputusan yang bijak bagi keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi keluarga memberikan sumber pertama kali atas tindakan setiap individu dengan mengenalkan beberapa nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat mulai diterapkan dan dikenalkan dalam lingkungan keluarga. Adanya ideologi ini diimplementasikan dilingkungan keluarga sebagai upaya individu menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab di kehidupan dan bermasyarakat sesuai dengan harapan dari ajaran keluarganya. Ideologi ini yang mengajarkan segala bentuk tindakan setiap individu untuk dapat

melakukan kebaikan dan meninggalkan hal yang tidak baik dilingkungannya, aturan-aturan yang bersifat khusus di dalam keluarga.

Ke-empat adalah ISA ideologi hukum. Ideologi ini mencakup tentang panduan masyarakat dalam bermasyarakat atau undang-undang. Ideologi hukum adalah ideologi yang dibuat untuk menertibkan segolongan masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial yang berlandaskan peraturan. Bentuk dari implementasi the legal ISA adalah institusi yang bergerak di bidang hukum. Sebagai contoh adalah Pengadilan Hukum yang menjalankan tugasnya sebagai legal institusi, dibuatnya institusi tersebut supaya setiap individu sadar dan mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Ideologi yang kelima menurut Althusser adalah ideologi politik yang termasuk di dalamnya adalah partai politik serta pengamat politik. Ideologi ini dibuat untuk menyampaikan segala bentuk pendapat individu terhadap perkembangan dan kemajuan politik di dalam tatanan masyarakat dan negara. Ideologi politik juga memiliki tujuan yang paling inti yang suatu pencapaian cita-cita yang luhur terhadap masyarakat. Ideologi ini ditanamkan oleh para penganut atau penggagas ideologi politik terhadap kader-kader partai politik yang menganut ideologi politik partai tertentu. Ideologi politik juga harus dijalankan oleh setiap individu yang memegang erat suatu ideologi dari partai politik yang dipercaya untuk tujuan kemasyarakatan dan pribadi individu sendiri.

Kemudian ISA serikat buruh atau bisa disebut juga dengan ideologi perdagangan. Althusser bermaksud untuk menghindari sistem monopoli dalam perdagangan di suatu daerah atau negara oleh pihak-pihak kaum borjuis. Ideologi ini berfungsi sebagai alat untuk membuat proses produksi dan reproduksi tetap berjalan dan berkembang. Dalam hal ini, produksi adalah kegiatan membuat suatu bahan yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidupnya. Sementara itu, reproduksi adalah proses memperbanyak suatu produk untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Apabila proses produksi dan reproduksi dilakukan oleh satu perusahaan akan terjadi monopoli di masyarakat, sehingga ideologi ini harus dianut oleh semua negara dan individu supaya tetap menjaga putaran roda ekonomi suatu negara dan tidak terjadinya kejahatan ekonomi. Ideologi perdagangan harus diimplementasikan dengan baik oleh instansi atau perseorangan yang bersifat swasta atau pemerintahan supaya terciptanya keadilan sosial.

Ideologi selanjutnya adalah ISA komunikasi yaitu ideologi yang melingkupi media masa (press), radio, televisi dan sebagainya, yang hanya dibuat untuk menjunjung tinggi kebenaran suatu berita, etika dalam membuat berita dan menyampaikan berita agar tidak terjadinya suatu hegemoni, miskonsepsi dan interpretasi suatu realitas yang disampaikan oleh berita media massa di kalangan masyarakat pada umumnya.

Dan yang ideologi terakhir adalah ISA kebudayaan yakni ideologi yang mencakup kesusastraan, seni, olahraga, literatur dan lainnya

sebagainya. Ideologi yang dibuat untuk menyebarluaskan pandangan akan hal-hal yang berkaitan dengan sastra, seni, olahraga dan literatur supaya setiap individu dapat mempelajari, mempercayai serta dapat menyampaikan ideologinya kepada individu yang lain. Ideologi kebudayaan ini Althusser mencontohkan suatu praktek lukisan yang mana sang pelukis dalam merealisasikan lukisannya dengan dasar ideologi kehidupan dan lingkungannya.

Ideologi tersebut mencerminkan suatu gambaran pada praktik institusi yang berada ditengah-tengah masyarakat dan telah diakui di beberapa pihak baik yang bersifat publik atau swasta. Perbedaan antara institusi publik dan swasta menurut Althusser adalah dalam menjalankan fungsinya yang sesuai dengan ISA. Althusser mengutip kalimat Gramsci yang memberikan suatu perbedaan antara institusi yang bersifat publik dan swasta sebagai berikut: dalam perannya distingsi antara publik dan privat merupakan suatu perbedaan internal dalam hukum borjuis, dan sah didalam wilayah-wilayah subordinatnya) yang juga merupakan suatu tempat hukum borjuis dalam menjalankan otoritasnya.

Wewenang negara telah dilepaskan olehnya, dalam hal ini para kaum borjuis menempatkan negara diatas hukum. Apa yang disebut negara, baginya merupakan suatu negara bagi kelas-kelas yang berkuasa, bukan negara dalam artian institusi publik ataupun privat, melainkan institusi publik atau privat sebagai prasyarat atas distingsi yang dapat ditegakkan oleh publik ataupun privat. Yang terpenting dalam pendapat Gramsci

Apparatus) yang dicetuskan oleh Louis Althusser dengan terminologi yang dicetuskan oleh Karl Marx dalam memahami negara sebagai Apparatur represif atau lebih dikenal dengan *State Apparatus* (SA). Marx juga menyebutkan bahwa negara merupakan mesin *repressive* (penidas) yang digunakan dengan kekuatan politik dan bersifat fisik kepada kelas pekerja. sehingga memungkinkan pihak yang disebut pertama (borjuis) ini untuk menundukkan pihak yang kedua(kelas pekerja), dalam basis supra-struktur kelas (yaitu eksploitasi kapitalis). Dengan demikian Althusser menyimpulkan bahwa titik esensial dari teori Marxis tentang negara (SA) terletak dalam bentuk formasi negara.

Althusser memahami bahwa suatu aparatus dalam eksistensinya di negara, tidak lain berfungsi sebagai kuasa negara (*state power*). Aparatus negara merupakan bagian struktur kekuasaan yang dapat memaksakan kepatuhan secara langsung secara represif dan masif, seperti polisi, pengadilan serta sistem penjara. Melalui aparatus-aparatus ini, negara basis supra-struktur yang memiliki kekuasaan untuk memaksa masyarakat untuk berkelakuan “baik” secara fisik. Cara kerja dari represif sendiri bersifat menindas atau kekerasan fisik. Penindasan yang dilakukan ini selanjutnya diberi arti ideologis, bernilai dan sah legal formal.

Aparatus negara ini berada di bawah kendali negara atau kekuasaan, dalam satu komando yang terlembagakan dalam tugas-tugas resmi. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, aparatur negara memiliki sifat yang sentralistis, represif dan sistematis dalam kerjanya. Aparatus negara ini

dalam pemahaman Althusser selalu identik dengan sistem dan struktur negara, yang semata-mata berdiri sebagai penyangga kekuasaan yang sah dan eksplisit. Keabsahan ini memungkinkan aparatur negara menjangkau publik lebih luas dan gerak hidupnya sendiri bersifat politik. Dalam aparatus negara (represif) yang terdiri secara formal yakni: pemerintah, administrasi, angkatan bersenjata, polisi, pengadilan, penjara, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya RSA memiliki persamaan dengan SA. Namun dilain sisi, RSA lebih memfokuskan diri pada fungsinya yakni: sebagai subjek dari struktur dalam negara baik secara privat maupun publik yang melakukan tindakan secara represif dan massif untuk melanggengkan suatu kekuasaan atau menundukkan masyarakat agar berkelakuan baik dilingkungan negaranya. Adanya tindak RSA yakni merepresentasikan bentuk ideologinya dengan kekerasan. Ideologi tersebut berasal dari ISA yang mengajarkan kepada warga negaranya untuk berkelakuan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Negara, sekalipun aturan-aturan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh warga negara. Ke dua dimensi ini erat dengan eksistensi Negara sebagai alat penindasan atau pembungkaman bagi perjuangan kelas.

Apparatur represif bekerja dengan memaksa individu secara masiv, sedangkan yang lain masuk dengan memengaruhi. Berangkat dari pengertian tersebut, Althusser membedakan antara perangkat Negara yang represif dengan sebutan RSA (*repressive state apparatus*) dan ISA

bahwa ideologi masuk (memanggil) dalam individu, dan menjadikannya subjek lewat institusi-institusi.

Althusser juga menyatakan bahwa ideologi dapat membentuk serta memberikan identitas personal pada subjek untuk mengubah individu tersebut. Proses pembentukan tersebut dapat berupa suatu bentuk pengakuan dalam diri subjek bahwa dia merupakan bagian dari struktur yang terorganisir dalam institusi atau lingkungannya. Dari pernyataan tersebut, ideologi memiliki peranan dalam membentuk subjek, karena ideologi selalu membutuhkan subjek dan subjek selalu menginterpelasi individu. Bagi althusser, individu dengan mudah akan terpengaruh ideologi karena individu memiliki suatu pengertian bahwa ideologi mampu membantu mereka dalam memahami dunia. Sehingga dalam prosesnya, akan terlihat secara alamiah dalam membentuk identitas pribadinya.

Sedangkan ISA merupakan suatu struktur ideologi yang berperan dalam membentuk subjek-subjek ideologi. Sehingga seorang individu yang ter-interpelasi menjadi subjek akan memiliki rasa tunduk atas aturan-aturan, norma, dan hukum yang diberikan oleh Subjek untuk menginterpelasinya.

Pada dasarnya kemunculan peristiwa itu dipicu oleh beberapa maksud yang mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Perihal pelaku yang membakar dan membawa bendera hitam bertuliskan Tauhid itu telah diamankan oleh pihak kepolisian, karena dalam tindakannya menjadikan dampak yang sangat besar dilingkungan masyarakat. MUI dan berbagai tokoh ormas Islam juga menyesalkan atas tindakan yang dilakukan oleh oknum Banser, sehingga pihak MUI meminta pelaku dari oknum Banser agar meminta maaf kepada seluruh umat Islam secara terbuka.

Keberhasilan pihak kepolisian Jabar dalam menangkap sejumlah pelaku di beberapa waktu lalu telah menunjukkan hasil yang signifikan, pasalnya hasil dari penangkapan itu mampu meredakan polemik yang ada di masyarakat. Bahkan pihak kepolisian Jabar juga mendalami motif dan tujuan dari para pelaku dengan melakukan penyelidikan secara intensif di Pengadilan Negeri (PN) Jawa Barat. Dalam kasus ini, pihak pemerintahan juga telah melimpahkan semua kasus ini pada pihak kepolisian guna diproses secara hukum dan juga menghimbau kepada pihak kepolisian agar peristiwa ini tidak dikaitkan dalam ranah politik.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim), Umar Surya Fana mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menemukan motif dan tujuan pelaku pada peristiwa pembakaran bendera Tauhid di Garut. Oknum Banser mengaku bahwa pengamanan bendera tersebut dengan maksud untuk membersihkan atribut atau bendera yang selain bendera merah putih, sesuai perjanjian. Di lain sisi, Banser juga menyatakan bahwa bendera yang

bendera yang diduga kuat milik organisasi terlarang (eks HTI) karena dalam hal ini organisasi tersebut sering memakai atribut itu diberbagai acara resminya.

Banser sendiri merupakan organisasi berbadan semi otonom milik Nahdlatul Ulama (NU) dari GP. Anshor yang bertugas sebagai pengaman dalam acara serta juga bergerak dalam menjalankan misi kemanusiaan diberbagai daerahdi Indonesia. Banser juga merupakan institusi yang mengklaim sebagai lembaga yang siap untuk membangun, menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman bentuk radikalisme.⁶⁷

Pada saat itu anggota Banser juga terlibat dalam kepanitiaan untuk memperingati Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat. Banser sendiri bertugas untuk mengamankan acara agar berjalan lancar, namun dipenghujung acara terdapat peserta yang membawa atribut bendera yang diduga kuat mirip simbol eks HTI, sehingga Banser yang bertugas sebagai pengaman mengambil dan membakar bendera itu agar terhindar dari perselisihan antara umat beragama.

⁶⁷Imam Solichun, "Peran Organisasi Pemuda dalam Menangkal Radikalisme (Studi Pada GP Anshor Kota Surabaya Periode 2017-2021)", (Tesis, Progam Studi Dirasah Islamiyah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Dalam kasus tersebut, Pihak Banser merasa kecewa karena terdapat oknum yang memprovokasi dan mengganggu jalannya acara dalam memperingati hari santri nasional, oknum tersebut membawa serta mengibarkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid. Sebelumnya, pihak panitia telah mencapai konsensus antar beberapa tokoh ulama dan masyarakat, dengan menghimbau para peserta untuk tidak mengibarkan atribut atau bendera selain merah putih. Namun, yang terjadi di lapangan terdapat oknum yang memprovokasi akan peristiwa tersebut. Sehingga banser mengamankan dan membakar bendera serta atribut yang digunakan oleh oknum tersebut.

Perihal Bendera, Banser menyatakan bahwa pembakaran bendera merupakan aksi dalam mendukung pemerintahan negara sebagaimana dalam visi dan misi yang dilakukan banser dalam menjaga dan membangunkedaulatan NKRI yang tertulis dalam semboyan nasionalismenya. Identitas bendera tersebut diduga kuat oleh pihak banser merupakan simbol yang sering digunakan oleh kelompok yang dilarang keberadaanya (eks HTI) dalam berbagai acara resminya. Hal ini dinyatakan pada beberapa media bahwa tindakan banser merupakan aksi dalam bela negara.

Kemudian, disisi lain juga terdapat kelompok yang merasa dirugikan oleh tindakan banser karena telah membakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid tersebut. Mereka menyatakan bahwa simbol dari bendera yang bertuliskan kalimat tauhid merupakan simbol bendera

simbol-simbol ke-Islaman. Aksi tersebut mengancam seluruh pihak yang membakar simbol kalimat tauhid.

Dengan demikian difahami, dalam peristiwa tersebut memunculkan beragam frame atau wacana yang sangat dominan dari kedua belah pihak. Frame tersebut menjabarkan kembali gerakan yang “memobilisasi konsensus” yang mendorong terjadinya kesepakatan terkait persoalan peristiwa tersebut, dan “memobilisasi aksi” yang mendorong terjadinya suatu gerakan aksi. Dalam wacana tersebut frame yang sangat dominan untuk menggerakkan aksi yakni frame aksi bela negara dan aksi bela tauhid.

B. Tinjauan *Ideological State Apparatus (ISA)*

Seperti yang telah penulis jelaskan, Althusser berpendapat bahwa ideologi merupakan segala sesuatu yang mendasari manusia terhadap aspek-aspek kehidupannya. Ideologi ini ditanamkan dalam diri manusia sejak ia terlahir ke dunia sampai ke liang lahat. Pada prosesnya, ideologi ditanamkan dalam bentuk keyakinan akan hasil pemikiran yang diimplementasikan ke dalam bentuk material. Tindakan tersebut, dilakukan secara bertahap dan rutin untuk menandakan bahwa ideologi itu telah melekat dalam diri individu.

Penyebaran ideologi dapat diidentifikasi lewat tatanan sosial masyarakat dengan menggunakan sistem aparatus negara yang bertujuan untuk merespon atau mengendalikan masyarakat. Sistem ini tersebar melalui institusi-institusi yang menopang kekuasaan negara atau golongan. Melalui

Ideologi State Apparatus (ISA), masyarakat akan ditanamkan dan diarahkan dalam suatu ideologi lewat institusi guna mereproduksi status quo.

Sebagaimana wacana yang dijelaskan sebelumnya, munculnya peristiwa pembakaran bendera di Garut Jawa Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Peristiwa tersebut mencerminkan akan sikap, kepercayaan, atau ideologi yang menyangkut suatu kelompok atau individu. Secara umum, hal yang melatar belakangi munculnya peristiwa tersebut jika ditinjau dari perspektif ideologi Louis Althusser memiliki relevansi terhadap *ideologi state apparatus* (ISA) keagamaan.

Munculnya *Ideological State Apparatus* (ISA) agama direpresentasikan pada masyarakat Indonesia yang tersebar melalui organisasi atau kelembagaan sosial masyarakat yang terorganisir secara matang. Hal itu terjadi karena banyaknya ormas agama yang ada di Indonesia menanungi serta memberikan faham ideologi keagamaannya dengan merefleksikan ke dalam bentuk moral, komitmen serta kepentingan sosial masyarakat, sehingga muncullah frame aksi bela negara dan aksi bela tauhid. Kedua frame tersebut merupakan dampak dari maraknya perkembangan praktik ideologi dari beberapa pihak individu maupun golongan yang mampu menjadikan dinamika atau polemik di Indonesia terkait identitas suatu bendera. Kedua frame ini juga menunjukkan akan beberapa perbedaan dalam menyikapi suatu framing ideologi dari suatu peristiwa seperti yang akan dijabarkan melalui gambar sebagai berikut;

organisasi eks HTI yang memiliki faham bertentangan dengan ideologi pancasila dan UUD 45, sehingga status badan hukumnya dicabut oleh negara.

Banser sendiri merupakan organisasi berbadan semi otonom milik Nahdlatul Ulama (NU) dari GP. Anshor yang berperan dalam mengembangkan, membangun serta menjaga kestabilan negara sejak penjajahan hingga sekarang, sehingga organisasi ini dianggap memiliki hubungan erat dalam pemerintahan negara. Secara historis, munculnya organisasi banser merupakan bentuk gerakan kemerdekaan yang terhimpun dalam laskar *Hizbullah* dalam memerangi penjajah. Kemudian pasca kemerdekaan, banser bersama para tentara (ABRI) terlibat dalam memerangi pki karena di nilai telah membahayakan para kiai dan negara umumnya, sehingga banser menjadi gerakan paramiliter yang memiliki hubungan erat pada negara.⁸¹

Pada dasarnya paramiliter merupakan suatu gerakan semi-militer yang digunakan sebagai kekuatan negara yang terstruktur dan terlembaga oleh suatu organisasi atau ormas tertentu, paramiliter ini menggunakan pelatihan ala militer, taktik, subkultur dan fungsi serupa dengan militer profesional, akan tetapi tidak termasuk bagian militer resmi negara. Dalam kamus KBBI disebutkan bahwa paramiliter adalah golongan yang memiliki kaitannya terhadap pasukan keamanan yang disusun, dan diikuti sertakan dalam deretan seperti halnya pasukan militer resmi serta memiliki fungsi dalam membantu

⁸¹Heri Suharyanto, "Militerisme dan Masyarakat (Studi Tentang Aspek-Aspek Militerisme yang Mempengaruhi Organisasi Kemasyarakatan Banser)", (Tesis, Progam Studi Ilmu-Ilmu Sosial, UNAIR, Surabaya, 2000).

Singkatnya, fungsi aparat negara tersebut dalam menjalankan tugasnya dengan cara mengintervensi dan represifitas terhadap masyarakat guna mengatur serta mengamankan kekuasaan. Jadi kehadiran negara didefinisikan sebagai suatu kekuatan eksekusi dan intervensi represif untuk mengatur, menjaga serta menertibkan masyarakat sesuai dengan norma atau peraturan yang telah dibuatnya. Secara formal Institusi ini terdiri dari; pemerintah, pengadilan, administrasi, angkatan bersenjata, polisi, serta penjara, dll.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai praktik ideologi represif dari organisasi Banser dalam peristiwa pembakaran bendera eks HTI yang terjadi saat memperingati hari santri nasional di alun-alun Limbangan, Garut, Jawa Barat. Banser sendiri merupakan tenaga inti dalam Gerakan Pemuda Anshor yang menjadi kader penggerak, pengemban dan pengaman program-program sosial kemasyarakatan. Gerakan ini dikenal sebagai semi militer yang memiliki kualifikasi seperti: disiplin dan didedikasi tinggi, ketahanan fisik dan mental yang tangguh, penuh daya juang guna mewujudkan cita-cita GP Anshor maupun negara.

Gerakan banser ini berfungsi untuk stabilisator negara yang didedikasikan dan berperan aktif dalam menciptakan stabilitas nasional, sehingga banser memiliki tugas dalam menjaga dan menjamin keutuhan bangsa dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan. Dengan demikian, banser dapat dikatakan sebagai organisasi paramiliter yang menerapkan ideologi militerisme guna menjaga serta menangkal bentuk radikalisme untuk membantu para aparat negara.

Sebagai badan semi-militer atau paramiliter, banser memiliki ideologi semi militer yang dipraktikkan dalam beberapa pelatihan, taktik, dan fungsi sebagai aparat pembantu negara. Hal ini sesuai dengan visi dan misi atau ideologi ISA banser yang menggaungkan nasionalisme pedomannya, *hubbul wathon minal iman* sebagai jargonnya dan juga visi misinya yang menganut paham Islam ahlu sunah wal jamah yang menjadikan banser sebagai mitra pemerintahan, dengan demikian banser dianggap sebagai aparatus negara yang memiliki peran dalam menangkal bentuk paham dan simbol Islam radikal yang ada di Indonesia.

Dalam peristiwa pembakaran bendera eks HTI yang dibakar oleh oknum Banser menunjukkan sikap yang anti terhadap simbol dan organisasi eks HTI, karena dalam kebijakan pemerintahan organisasi tersebut telah dibubarkan secara resmi oleh pemerintahan negara sesuai kebijakan pemerintahan melalui ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 45. Tindakan yang diambil oleh oknum banser terkait pembakaran bendera eks HTI mencerminkan bentuk sikap kedisiplinan, bertanggung jawab, sigap, otoriter, konservatif, patuh dan taat, nasionalis, serta tegas dalam menangkal bentuk radikalisme.

Banser sendiri mempraktikkan ideologi militer RSA yang melakukan tindakan pembakaran terhadap bendera eks HTI sebagai bentuk upaya mengamankan serta menjaga keutuhan NKRI, paham semi-militer tersebut menjadikan banser sebagai mitra pembantu pemerintahan negara dalam

menjaga dan membela negara. Banser dianggap sebagai gerakan aparat yang pro terhadap pemerintahan negara, sehingga Banser dapat dikatakan sebagai organisasi paramiliter yang memiliki kewajiban membantu dan menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian ISA yang dianut oleh banser menuntun tindakan pendisiplinan dalam menangkal bentuk paham dan simbol Islam radikal yang mengancam kedaulatan negara.

Pada dasarnya banser bukanlah aparat resmi milik pemerintahan negara mereka bergerak dalam satuan komando yang secara garis vertikal maupun horisontal berada di bawah pimpinan GP Anshor dalam naungan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama yang menerapkan ideologi militer semi otonom yang biasa disebut dengan paramiliter. Namun, dalam kaitannya terhadap teori ideologi Louis Althusser sebagai tinjauan *ideological repressive apparatus* banser telah menjadi aparat negara berdasarkan fungsinya dalam melaksanakan tugasnya yakni; menjaga kedaulatan NKRI.

Meminjam perkataan Gramscy, Althusser menyatakan bahwa perbedaan ruang privat (ormas) atau publik (negara) bukanlah menjadi titik acuan dalam penerapan teori ideologinya. Perbedaan status quo dalam menentukan privat maupun publik hanya terjadi dalam institusi-institusi yang diciptakan oleh para kaum borjuis guna mengintervensi para kaum proletar. Sehingga penekanan ideologi dalam tataran privat maupun publik tercipta sebagai pembeda. Althusser sendiri lebih menekankan teori ideologinya terhadap fungsi dari institusi dalam menentukan status quonya.

selain bendera merah putih. Kemudian, dari diagnosa peristiwa tersebut muncul *prognostic framing* yakni bahwa bendera yang dibakar merupakan bendera eks hti yang secara hukum statusnya telah dicabut oleh negara, namun juga muncul statemen bahwa bendera tersebut bukan bendera eks hti melainkan bendera rasulullah sehingga pembakaran tersebut dikecam dan dinilai telah menistakan agama. Kejadian pro kontra tersebut lalu menjadikan dinamika pro dan kontra tahap framing selanjutnya yakni *motifasi framing* bahwa tindakan banser merupakan upaya dalam menangkal simbol atau gerakan radikalisme sehingga pembakaran itu terjadi, disisi lain aksi banser tersebut digugat oleh pembela tauhid untuk diadili secara hukum karena telah menistakan agama.

Kedua, hasil daripada analisis framing peristiwa pembakaran bendera eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Barisan Anshor Serba Guna Nahdlatul Ulama (BANSER) menurut perspektif Louis Althusser, menyebutkan bahwa terjadinya peristiwa pembakaran bendera tersebut dikarenakan adanya praktik ideologi ISA (*Ideological State Apparatus*) dan RSA (*Repressive State Apparatus*) yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Lebih jelasnya, dinamika peristiwa pembakaran bendera tersebut memiliki keterkaitan dalam konflik horisontal yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antar ormas di Indonesia. Dalam menjalankan praktik ideologi keagamaannya, beberapa ormas memiliki faham yang berbeda-beda, hal itu terjadi karena banyaknya ormas yang menaunginya. Dalam tinjauan Althusser, mayoritas pengguna represif didominasi oleh ormas yang memiliki tujuan untuk mempertahankan

